

BAB II

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

A. Geografis Nanggroe Aceh Darussalam

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lebih di kenal dengan nama Aceh, sering juga disebut dengan Daerah Modal¹ atau "Serambi Mekkah"², terletak pada paling ujung barat Indonesia antara 2 sampai 6 Lintang Utara, 95 sampai 98 Bujur Timur. Ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut, letaknya strategis pada jalur pelayaran dan penerbangan internasional, Aceh salah satu provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan wilayah administrasi pertama ketika Wakil Perdana Menteri dijabat oleh Mr Syarifuddin Prawiranegara, melalui Ketetapan No.8/Des/WPM pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 17 Desember 1949, Provinsi Sumatera Utara di bagi menjadi dua Provinsi dengan menambah Provinsi Aceh sekaligus menetapkan Gubernur dan mengangkat Teungku Muhammad Daud Beureuiah³.

Batas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : sebelah Barat dan Selatan Samudra India, sebelah Timur dengan Sumatera Utara dan Selat Malaka, sebelah Utara dengan Laut India. Status istimewa bagi Aceh berawal dari Misi

¹Disebut Aceh sebagai Daerah modal pertama sekali adalah ungkapan Soekarno Presiden Republik Indonesia, dimana ketika beliau datang ke Aceh untuk meresmikan Ke istimewaan Aceh, alasan beliau ada 2 hal penting dicatat sejarah yaitu : 1). Satu-satunya Daerah Indonesia yang baru dapat terjajah oleh Belanda tahun 1904 adalah Aceh setelah penyerahan resmi oleh Teungku Muhammad Daud raja Aceh terakhir yang jika dibandingkan dengan wilayah lainnya sejak tahun 1556 setelah Portugis sejak tahun 1511 menaklukkan Malaka, jajahan Belanda ini juga terkesan secara formalnya saja sedangkan hati rakyat tidak pernah terebut terbukti dengan pemberontakan yang secara terus menerus terjadi ; 2). Ketika Wilayah Republik Indonesia telah terkuasai kembali oleh Belanda saat Agresinya tahun 1948, saat-saat penting dan genting ini suara Radio Rimba Raya yang disiarkan dari Pedalaman Aceh membahana ke penjuru dunia yang memberitakan bahwa Negara Republik Indonesia masih tetap utuh dan merdeka. (S.M.Amin,*et.al*, "Sejenak meninjau Aceh, Serambi Mekkah" dalam *Bunga Rampai Tentang Aceh* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980) h.74.

²Alasan disebutnya Serambi Mekkah disebabkan karena pertama penduduk pribumi memang 100 % beragama Islam, adapun non Muslim adalah para pendatang seperti etnis Tionghoa dan Suku Batak dari Sumatera Utara yang memang tetangganya , yang kedua kemungkinan karena Daerah paling ujung barat Indonesia yang bila dibandingkan, Aceh lebih dekat ke Mekkah Saudi Arabia.

³Amin, *Bunga Rampa*, h.76.

perdamaian Mr. Hardi ke Aceh, mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh Aceh termasuk unsur DI/TII, sehingga lahir Keputusan Perdana Menteri RI Nomor. 1/Missi/1959⁴ tanggal 26 Mei 1959, semula Provinsi Aceh berubah menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam arti diberi kewenangan penuh dalam tiga hal untuk diselenggarakan sendiri yaitu :

1. Istimewa di bidang Agama
2. Istimewa di bidang Pendidikan
3. Istimewa di bidang Adat Istiadat

Luas wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah 57.365,57 Km² atau 5.736.557 Ha⁵, keseluruhan luas ini terdiri dari : hutan, areal pertanian (sawah, ladang, perkebunan masyarakat, perusahaan negara dan swasta), padang rumput/ilalang, danau dan sungai, areal perkotaan dan kampung serta lapangan dan jalan. Sebagai wilayah yang berada di ujung barat Pulau Sumatera, duapertiga wilayahnya di kelilingi laut, ada pula di lepas pantai Selatan dan Barat terdapat pulau-pulau, baik telah di huni manusia atau tidak seperti Pulau Semeule, sekitar Pulau Banyak, Pulau Weh Sabang dan Pulau Bereuh, Pulau Nasi dan lain-lainnya. Hampir merata sekitar pantai radius 4 km merupakan hamparan yang dimanfaatkan masyarakat untuk tanaman kelapa, tambak, dan tempat rekreasi, kecuali di sekitar bibir pantai barat (Gruetee) tebing ke laut, sedangkan di arah pedalaman (dataran tinggi) bergelombang yang termasuk lintasan bukit barisan Sumatera, karenanya Daerah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah beriklim tropis, musim kemarau tiap tahunnya antara bulan Pebruari sampai Agustus, musim penghujan antara bulan September sampai bulan Januari. Curah hujan berkisar antara 1000 mm sampai 2000 mm di pesisir Utara dan Timur, 2000 mm sampai 3000 mm di bagian pedalaman (pegunungan) dan pesisir Barat Selatan, dengan demikian curah hujan tidak merata untuk seluruh Aceh.

⁴ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993).

⁵Sumber: *Aceh dalam Angka Tahun 2005* (Banda Aceh: Bappeda Provinsi NAD, 2005), h.3

Keadaan suhu berbeda untuk seluruh wilayah Aceh, di Daerah-Daerah pesisir pantai pada umumnya berhawa panas berkisar antara 25 C sampai 30 C dan sekitar pegunungan (dataran tinggi) berhawa sejuk antara 20 C sampai 25 C serta kelembaban nisbi berkisar antara 65 % sampai 75 %⁶.

Pembagian wilayah administratif provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur serta perangkat lainnya sesuai peraturan berlaku untuk seluruh Indonesia, jika adapun perbedaan kecil seperti istilah nama dan penambahan struktur pemerintahan dibawah camat di atas Kepala Desa dengan istilah Imeum Mukim⁷, ketika terjadinya reformasi telah semakin bertambah yang didukung semangat otonomi, maka Kabupaten/Kota yang ada saat ini (September 2006) adalah :

1. Kotamadya Sabang dengan 18 Kelurahan ibukotanya Sabang
2. Kotamadya Banda Aceh dengan 89 Kelurahan ibukotanya Banda Aceh
3. Kotamadya Lhok Seumawe dengan 68 Kelurahan ibukotanya Lhok Seumawe
4. Kotamadya Langsa dengan 51 Kelurahan ibukotanya Langsa
5. Kabupaten Aceh Besar dengan 547 desa ibukotanya Jantho
6. Kabupaten Aceh Barat dengan 290 desa ibukota Meulaboh
7. Kabupaten Aceh Tengah dengan 271 desa ibukotanya Takengon
8. Kabupaten Aceh Timur dengan 487 desa ibukotanya Idi Rayeuk
9. Kabupaten Aceh Utara dengan 850 desa ibukotanya Lhok Suekon
10. Kabupaten Aceh Selatan dengan 247 desa ibukotanya Tapaktuan
11. Kabupaten Aceh Tenggara dengan 164 desa ibukotanya Kotacane
12. Kabupaten Aceh Singkil dengan 189 desa ibukotanya Singkil
13. Kabupaten Aceh Tamiang dengan 209 desa ibukotanya Kuala Simpang
14. Kabupaten Aceh Jaya dengan 158 desa ibukotanya Calang

⁶Sumber Kantor Metereologi dan Geofisika Nanggroe Aceh Darussalam 2006.

⁷Kemungkinan akan banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh, hal ini cukup beralasan karena lahirnya UU no. 11 tahun 2006, namun sampai dengan saat ini awal Nopember 2006, baru 1 Qanun yang disahkan oleh DPRD Aceh Qanun No. 7 tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang disesuaikan dengan UU tersebut.

15. Kabupaten Aceh Barat Daya dengan 129 desa ibukotanya Blang Pidie
16. Kabupaten Pidie dengan 952 desa ibukotanya Sigli
17. Kabupaten Bireun dengan 535 desa ibukotanya Bireun
18. Kabupaten Nagan Raya dengan 222 desa ibukotanya Jeuram
19. Kabupaten Gayo Lues dengan 68 desa ibukotanya Blang Kejeren
20. Kabupaten Bener Meriah dengan 232 desa ibukotanya Simpang Tiga Redelong
21. Kabupaten Simelue dengan 81 desa ibukotanya Simelue⁸.

B. Sejarah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Paling tidak, secara umum ada tiga hal membuat Aceh terkenal di nusantara dan internasional yaitu : 1). Zaman keemasan kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam dengan Rajanya Sultan Iskandar Muda (tahun 1607 – 1636), mungkin karena luasnya wilayah, kemampuan diplomatik dengan pihak asing ; 2). Di kenal sebagai Daerah yang kental dengan Agama Islam, termasuk menghadapi penjajah karena nilai agama, sudah ditanamkan sejak dini melalui hikayat perang Sabil, termasuk jiwa pemberontak yang berkaitan dengan menjaga kemurnian agama dan harga diri, 3). Akibat peristiwa alam yang dahsyat saat Tsunami hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 lalu, yang menelan korban terbesar sepanjang sejarah dunia.

Masih ada berbagai versi dan berkembang di dalam masyarakat awam tentang asal penyebutan kata Aceh, di antaranya ACEH adalah singkatan dari Arab Cina Eropa dan Hindia, memang dari segi fisik orang Aceh termasuk watak atau karakter sering di dapati kesamaan, ada juga memberi argumen dengan perilaku orang Aceh yang gemar berbisnis maka Aceh itu merupakan gambaran bisnis yakni *Asal tau Cara Enak Hidup* (ACEH). Dalam teori Tgk.Sjekh Muhammad Noerdin nama Aceh itu berasal dari kata “Atja” yang artinya bagus, konon kata ini diucapkan oleh orang Hindu dari India tatkala mereka pertama

⁸ Sumber Kantor BPS Nanggroe Aceh Darussalam semester Pertama Tahun 2006

mendarat di Aceh⁹, pada sebelum masehi. Keberadaan Hindu pernah berkembang di Aceh didukung adanya sebuah kota kecil Indrapuri 40 km sebelah tenggara Banda Aceh, hal ini mengingatkan kita bahwa pengaruh dalam peradaban dan bahasa Aceh dari Hindu memang tidak dapat di sangkal. Dalam tulisan yang sama Prof. Aboebakar Bakar Aceh juga mengutarakan kemungkinan nama Aceh berasal dari kata Aca (Atjeuk : Sunda) yang berarti Saudara perempuan. Konon kata-kata Aceh itu berasal juga dari “*Ba’si-aceh-aceh*” semacam pohon beringin yang besar dan rindang, yang saat ini jarang dijumpai lagi di Nangroe Aceh Darussalam.

Seperti telah disinggung di atas, salah satu kemegahan Aceh di mata dunia, telah pernah tercatat dalam sejarah tentang kemegahan Kerajaan Islam pertama, yakni Samudra Pasai. Bukti ini telah disaksikan oleh Marcopolo tahun 1292 M, termasuk pernah dikunjungi pelaut Arab Ibnu Batutah tahun 1343¹⁰, kemudian Kerajaan Aceh Darussalam dengan raja pertamanya Sultan Ali Mughayat Syah alias Raja Ibrahim (1514-1530), masa keemasan di bawah Pimpinan Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636), yang merupakan negara terkemuka di Asia Tenggara, belaiu mampu menyatukan raja-raja kecil di Sumatera sampai ke Moko-moko Bengkulu, Indragiri di Jambi sekarang, bahkan sampai seberang hingga Kedah, Pahang, Trengganu Malaysia, serta kemampuan diplomatik luar negerinya sampai ke Turki dan Negara-negara barat lainnya, keunggulan Aceh terutama pemusatan di bidang perdagangan merica, kapur barus, pinang ke benua Eropa.

Setelah wafatnya Sulthan Iskandar Muda tahun 1536, keadaan Kerajaan Aceh mulai melemah, apa lagi ketika kerajaan Aceh secara berturut-turut pernah dipimpin oleh empat orang Ratu yakni Shafiatuddin Syah, Naqiatuddin Shah, Zakiatuddin Shah dan Kamalat Shah (1641-1699), kondisi kerajaan semakin

⁹Ismail Sunny, “Kata Pendahuluan”, dalam *et.al. Bunga Rampai tentang Aceh* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), h.1

¹⁰Osman Raliby, *et.al*, “Aceh, Sejarah dan Kebudayaan” dalam “*Bunga Rampai*, h.31

lemah, sebab lain dari kelemahan kerajaan Aceh datang dari luar kerajaan, yaitu gangguan yang dilancarkan oleh Inggris, Portugis dan Belanda, bangsa barat ini mulai berebut wilayah menguasai kawasan Asia Tenggara, atau umumnya Eropa berupaya keras untuk menjajah wilayah-wilayah Islam seperti Indonesia.

Sebelum Belanda melakukan ekspansi terhadap Aceh, antara kerajaan Aceh dengan beberapa Negara barat masih saling menghormati, karena adanya nota kesepakatan kerja sama dalam bidang perdagangan, serta pengakuan dari Inggris tahun 1819 terhadap kedaulatan Kemerdekaan Kerajaan Aceh, melindungi pelayaran sekitar ujung Sumatera bagian utara yang di kenal dengan Perjanjian London¹¹, sisi lain pihak Belanda dan Portugis¹² terus melancarkan propaganda di kalangan rakyat, mengganggu pelayaran merica Aceh di perairan India, sehingga kerajaan Aceh harus membuat perjanjian dengan Belanda dan Inggris, perjanjian ini dilaksanakan di Painan tanggal 16 Juli 1663, isi perjanjian tersebut antara lain, Daerah seperti Padang, Tiku bahkan sampai ke Indrapura di jamin kemerdekaan dari Aceh. Hal ini tentu sebagai harga mahal yang diberikan Belanda semata untuk mematahkan perdagangan monopoli Merica Aceh. Selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 1872, tanpa restu dan sepengetahuan Kerajaan Aceh, Inggris dan Belanda terus mengikat suatu perjanjian lagi bahwa Sumatera diberi kekuasaan penuh di bawah pemerintahan Belanda khususnya Aceh¹³.

Konsekuensi logis kesepakatan Inggris dan Belanda ini memotivasi Belanda untuk menguasai Aceh yang diawali dengan ultimatum Pemerintah Belanda di Batavia tanggal 26 Mei 1873 kepada Raja Aceh, ultimatum ini ditolak oleh Raja Aceh serta menolak dengan tegas tuntutan Belanda agar Aceh menyerahkan pemerintahan kepada Belanda, penolakan ini jelas merupakan

¹¹*Ibid*, h.36 ; Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, terj. Masri Maris, (Jakarta: Obor Indonesia,2005), h.12.

¹²Seperti di ketahui bahwa pada tanggal 14 Agustus 1511 Portugis telah mendarat di Malaka, dan Belanda mendarat di Batavia tahun 1558, kedua bangsa ini secara perlahan-lahan adalah saingan Kerajaan Aceh dan pada akhirnya menjadi musuh secara terang-terangan.

¹³Reid, *Asal Mula*, h.14

sikap perlawanan kepada Belanda, maka dengan penuh perhitungan Belanda mengirim pasukan ke Aceh, pendaratan pertama di Kuta Raja, dengan pimpinan komando Jendral Kohler, serbuan pertama di pusatkan ke Masjid Raya Baiturrahman, ternyata mendapat perlawanan yang cukup sengit dari rakyat Aceh sehingga pasukan Belanda harus mundur dengan kerugian besar termasuk Jendral Kohler sendiri menjadi korban, demikian juga serangan kedua yang dilakukan oleh Belanda dengan menggempur benteng Aceh, terulang pihak Belanda harus mundur kelaut dan strategi Belanda mengurung pantai Aceh, namun semangat ekspedisi Belanda ke Aceh jauh melemah. Baru setelah persiapan matang, jumlah pasukan yang paling banyak dalam sejarah peperangan Belanda di Nusantara, di bawah Komandan Jendral Van Sweiten dan wakilnya Jendral Verspick barulah dapat menerobos Aceh secara berangsur-angsur.

Keberhasilan Belanda menguasai Aceh secara formal, termasuk kemampuan strategi dapat mengadu domba kaum bangsawan dan kaum ulama, sebut saja ketika Teuku Umar dapat bergabung dengan Belanda yang mewakili kaum Uleebalang (bangsawan), turut memusuhi dan memerangi kaum ulama di bawah pimpinan Teungku Cik Di Tiro, sehingga membuat persatuan di kalangan rakyat Aceh buyar, walaupun ke ikut-sertaan Teuku Umar bersama Belanda dengan dalih menyiasati taktik dan pencurian senjata Belanda, untuk dikirim secara rahasia kepada para gerilyawan di hutan, namun Teuku Cik Di Tiro syahid dalam suatu peperangan tahun 1896 dan Teuku Umar tahun 1899, strategi lain yang dilakukan oleh Belanda adalah dengan mengirim seorang ilmuan khusus ke Aceh bernama Dr. Snouck Hurgronje, pernah tugas belajar Agama dan prihal ketimuran di Saudi Arabia, beliau yang dianggap 'alim, mampu membuat persoalan khilafiah di tengah-tengah umat, akibatnya masyarakat terkotak-kotak

oleh perselisihan ibadah¹⁴ dari ajaran dan da'wah, secara sukarela dilakukan oleh orientalis terutama di pedalaman Aceh yang di kenal dengan Tgk. Abib Putih¹⁵.

Setelah dalam perang berkepanjangan selama 30 Tahun (1873-1903), rakyat Aceh telah mengalami kehilangan pemimpinnya maka Raja Aceh terakhir Tuanku Muhammad Daud menyerah kepada Belanda tahun 1903, maka secara resmi mengakhiri perang, kendatipun masih di bawah komando para Ulama dan bangsawan, perang tetap berkobar, jiwa patriotisme Aceh tetap bersemangat dan merasa dirinya belum pernah ditaklukkan sampai akhirnya pendaratan tentara Jepang tanggal 12 dan 13 Maret 1942 di empat tempat yaitu : Sabang, Ujung Bate, Kuala Bugak dan Tanjung Tiram¹⁶.

Kehadiran Jepang di Aceh pada mulanya disambut baik oleh rakyat, apalagi Jepang memperkenankan pengibaran bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun ketika rasa keberagamaan mereka di usik dan dilukai, seperti menyuruh sembahyang mengarah ke istana Kaisar Jepang di Tokyo dalam setiap upacara pagi hari, maka orang Aceh mulai terang-terangan memaki Jepang seperti kalimat : *Ceulet asse, geutrimong bui (Aceh Pesisir) = Tangkuh ari awah lipe mayo ku awah beye (Gayo)* artinya kita usir anjing (Belanda) kita terima babi (Jepang) dan Lepas dari mulut Ular (Belanda)

¹⁴Contoh kasus yang diciptakan adalah masalah qunut di waktu shalat shubuh, di satu kampung dia mengajarkan harus dilakukan, dikampung lain tidak boleh karena sudah dilarang oleh Allah yang dasarnya sama-sama kuat yang disampaikan oleh Dr.C. Snouck Hurgronje yang dikenal dengan nama Tgk.H.Abib Putih, sehingga pada suatu saat ada jama'ah pada waktu yang sama saling salah menyalahkan dan mengharuskan berpisah jama'ah dengan berlainan tempat shalat dengan membuat *meunasah* yang baru.

¹⁵Salah seorang yang masih hidup Tgk. Ibrahim Mantiq di Takengon menceritakan bahwa Abib Putih ini rupanya seorang kafir, diketahui bahwa ketika beliau berada dalam wc masjid Bebesen Aceh Tengah yang pintunya tidak dikunci, maka ada seseorang yang buru-buru mau masuk kedalam wc, dengan tergesa menolak pintu wc dan Abib Putih sedang ada di dalam, pada saat itulah terlihat bahwa kemaluan Abib Putih tidak "dikhitan", ini menunjukkan kalau Abib Putih seorang yang kafir dan diberitahu kepada masyarakat, akibatnya masyarakat mencari Abib untuk dipersaksikan, sebelum terjadi, Abib Putih telah lari menyelamatkan diri ke markas Belanda, selanjutnya dikirim pulang kenegeri asalnya Belanda. Namun banyak orang terutama para ilmuan yang mengenal Aceh dewasa ini berkat tulisan Dr. Snouck Hurgronje terutama karyanya tentang Aceh dan Gayo yang berjudul *De Atjehers* dan *Het Gajoland en Zijne Bewoners*.

¹⁶Raliby, *Bunga Rampai*, h.39

oleh perselisihan ibadah¹⁴ dari ajaran dan da'wah, secara sukarela dilakukan oleh orientalis terutama di pedalaman Aceh yang di kenal dengan Tgk. Abib Putih¹⁵.

Setelah dalam perang berkepanjangan selama 30 Tahun (1873-1903), rakyat Aceh telah mengalami kehilangan pemimpinnya maka Raja Aceh terakhir Tuanku Muhammad Daud menyerah kepada Belanda tahun 1903, maka secara resmi mengakhiri perang, kendatipun masih di bawah komando para Ulama dan bangsawan, perang tetap berkobar, jiwa patriotisme Aceh tetap bersemangat dan merasa dirinya belum pernah ditaklukkan sampai akhirnya pendaratan tentara Jepang tanggal 12 dan 13 Maret 1942 di empat tempat yaitu : Sabang, Ujung Bate, Kuala Bugak dan Tanjung Tiram¹⁶.

Kehadiran Jepang di Aceh pada mulanya disambut baik oleh rakyat, apalagi Jepang memperkenankan pengibaran bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun ketika rasa keberagaman mereka di usik dan dilukai, seperti menyuruh sembahyang mengarah ke istana Kaisar Jepang di Tokyo dalam setiap upacara pagi hari, maka orang Aceh mulai terang-terangan memaki Jepang seperti kalimat : *Ceulet asse, geutrimong bui (Aceh Pesisir) = Tangkuh ari awah lipe mayo ku awah beye (Gayo)* artinya kita usir anjing (Belanda) kita terima babi (Jepang) dan Lepas dari mulut Ular (Belanda)

¹⁴Contoh kasus yang diciptakan adalah masalah qunut di waktu shalat shubuh, di satu kampung dia mengajarkan harus dilakukan, dikampung lain tidak boleh karena sudah dilarang oleh Allah yang dasarnya sama-sama kuat yang disampaikan oleh Dr.C. Snouck Hurgronje yang dikenal dengan nama Tgk.H.Abib Putih, sehingga pada suatu saat ada jama'ah pada waktu yang sama saling salah menyalahkan dan mengharuskan berpisah jama'ah dengan berlainan tempat shalat dengan membuat *meunasah* yang baru.

¹⁵Salah seorang yang masih hidup Tgk. Ibrahim Mantiq di Takengon menceritakan bahwa Abib Putih ini rupanya seorang kafir, diketahui bahwa ketika beliau berada dalam wc masjid Bebesen Aceh Tengah yang pintunya tidak dikunci, maka ada seseorang yang buru-buru mau masuk kedalam wc, dengan tergesa menolak pintu wc dan Abib Putih sedang ada di dalam, pada saat itulah terlihat bahwa kemaluan Abib Putih tidak "dikhitan", ini menunjukkan kalau Abib Putih seorang yang kafir dan diberitahu kepada masyarakat, akibatnya masyarakat mencari Abib untuk dipersaksikan, sebelum terjadi, Abib Putih telah lari menyelamatkan diri ke markas Belanda, selanjutnya dikirim pulang kenegeri asalnya Belanda. Namun banyak orang terutama para ilmuan yang mengenal Aceh dewasa ini berkat tulisan Dr. Snouck Hurgronje terutama karyanya tentang Aceh dan Gayo yang berjudul *De Atjehers* dan *Het Gajoland en Zijne Bewoners*.

¹⁶Raliby, *Bunga Rampai*, h.39

masuk ke mulut Buaya (Jepang), pemberontakan terhadap Jepang terjadi di Bayu Aceh Utara di bawah pimpinan ulama Tgk. Abdul Djalil, terjadi juga di Pandrah Kabupaten Bireun sekarang di pimpinan Teuku Muhammad Yacub, serta penyerangan tangsi Jepang lainnya di seluruh Aceh sampai menjelang Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945¹⁷.

Kemerdekaan Indonesia disambut rakyat Aceh dengan penuh suka cita, Aceh merupakan satu kesatuan dalam bentuk Residen Wilayah, jabatan residen di pangku oleh Teuku Nyak Arif sejak proklamasi sampai pertengahan Januari 1946, kemudian digantikan oleh Teuku Muhammad Daudsyah sampai bulan Mei 1948, pada tahun 1948 Aceh dilebur ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara bersama Tapanuli dan Sumatera Timur, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 tanggal 15 April 1948, kebijakan peleburan oleh pemerintah pusat ini, ditantang sengit oleh masyarakat Aceh, maka setahun kemudian Aceh dijadikan suatu kesatuan otonomi dengan sebutan “ Daerah Militer Aceh “, Gubernur Militernya Teungku Muhammad Daud Beureuiah. Pembubaran Provinsi Sumatera Utara dan Pembentukan Daerah Militer Aceh ini dilaksanakan atas Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : 21/Pem/PDRI/16/5.

Ketika terjadi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia berpusat di Sumatera Barat dan Pedalaman Aceh yang di pangku Mr. Sjarifuddin Prawiranegara, telah melihat Aceh dari dekat, kemudian keadaan Pemerintah Republik Indonesia sudah normal kembali, Mr Syarifuddin diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri, pada kesempatan itulah beliau mengeluarkan Ketetapan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor : 8/Des/WPM tanggal 17 Desember 1949 yang memecah Provinsi Sumatera Utara menjadi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Timur/Tapanuli. Walaupun pada giliran berikutnya tidak disetujui Pemerintah Pusat melalui kawat Menteri Dalam Negeri Mr. Assa'at, bahwa

¹⁷*Ibid*, h.40

pembentukan Provinsi Aceh akan ditinjau kembali, namun karena ditolak oleh rakyat Aceh, dikirim lagi kawat susulan memberitahukan “ Provinsi Aceh de facto boleh berjalan terus”.

Yang tidak dapat dilupakan oleh sejarah bahwa pada awal-awal kemerdekaan yang dikenal masa revolusi, bahwa tersiar berita Belanda akan menguasai kembali Daerah jajahannya di Nusantara, Belanda melancarkan agresi pertama pada Juli 1947, agresi kedua akhir tahun 1948, seluruh wilayah Indonesia dapat dikuasai kembali kecuali Aceh dan Banten, pada masa inilah jasa rakyat Aceh untuk Indonesia sangat besar, sebut saja contohnya, sumbangan rakyat Aceh untuk pembelian pesawat terbang pertama Indonesia dengan nama “Seulawah I dan II ”, pendanaan untuk belanja pemerintah Darurat Republik Indonesia oleh saudagar Aceh. membeli dengan uang kontan tanpa barang berupa getah, hal ini atas jaminan Pemerintah Daerah Sumatera Utara. karena harus melalui selundupan sementara uangnya telah dibayarkan kepada Pemerintah Darurat Republik Indonesia secara kontan.

Keadaan de facto ini berlarut-larut, karena belum ada tanggapan jelas dan tegas dari pemerintah pusat tentang status Aceh secara yuridis formal, oleh karena itu, di Daerah Aceh terus melancarkan tuntutan yang telah terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tuntutan Aceh agar berdiri sendiri dengan provinsi sendiri yang dimotori oleh para Ulama, tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureuiah, secara berulang telah mengadakan dialog dengan petinggi pusat yang datang silih berganti ke Aceh, termasuk Presiden Soekarno, beliau adalah yang menyebutkan Aceh sebagai Daerah modal revolusi, konon ketika para ulama menyampaikan asfisasi antara lain provinsi tersendiri, bebas menerapkan Syari’at Islam. Presiden berjajnji menyanggupi akan menindak-lanjutinya sekembalinya ke Jakarta, bahkan untuk Syari’at Islam, jangankan untuk Aceh, bila memungkinkan akan

diterapkan di seluruh Indonesia¹⁸. Namun belum ada tanda-tanda kemauan pemerintah pusat untuk membentuk Aceh dalam satu provinsi dengan hak otonomi, maka rasa kekecewaan ini membuat para tokoh-tokoh bergabung dalam Bekas Pejuang Aceh (BPA) dengan dukungan Masyumi dan Perti, sehingga pada tanggal 21 September 1953 memperoklamirkan berdirinya “ Negara Islam Indonesia “ dan menyatakan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena masih dianggap sepihak, orang yang mendirikan Negara Islam Indonesia ini adalah tindakan makar atau pemberontak maka tokoh-tokoh NII ditangkapi, walaupun hal ini bukanlah penyelesaian yang terbaik. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 1956 telah diberi otonomi kepada Aceh, tetapi pemerintah pusat masih bersikap setengah hati, kelahiran Undang-Undang ini terkesan dari desakan kabinet Mr. Burhanuddin Harahap. orang Sumatera yang waktu pemerintahannya baru berumur 8 (delapan) bulan. Kemudian ketika Mr. Hardi menjadi Wakil Perdana Menteri keluarlah Ketetapan Nomor : I/Misi/1959 Tanggal 26 Mei 1959 yang menyebutkan Provinsi Aceh di beri nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, pengertian pusat bahwa pemberian istimewa adalah dapat menjalankan sebebas-bebasnya dalam bidang keagamaan (Islam), adat istiadat dan pendidikan, namun hal penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah termasuk untuk Daerah Istimewa Aceh tetap takluk dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor : 1 / 1957 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah¹⁹.

Demikianlah perjalanan Provinsi Aceh sejak masa kejayaan di abad ke 17 yang mengalami pasang surut, keistimewaan dalam bidang Pendidikan, Agama dan Adat Istiadat atas dasar Misi Hardi merupakan taktik pusat untuk menenangkan hati rakyat Aceh, dalam praktisnya tidak ada perbedaan khusus dengan Daerah lain di seluruh Indonesia, pendidikan yang berlaku adalah sistem pendidikan nasional, keberadaan hukum agama dan hukum adat tidak memiliki

¹⁸M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, (Yogyakarta: Ceninnets Pres,2004), h.73

¹⁹Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1995), h.217 ; Raliby,*Bunga Ramapi*, h.95

kekuatan, kecuali hukum Nasional KUHAP peninggalan Belanda. Ketika masa Orde Baru yang menjadi prioritas pemerintah adalah pemantapan stabilitas politik dan keamanan dengan strategi pembangunan dalam segala bidang, Aceh semakin terabaikan, menjadi tamu di rumah sendiri, keadilan pusat dan Daerah semakin pincang, aspirasi rakyat Aceh ditanggapi setengah hati, kesemua ini membuat kekecewaan sebahagian rakyat Aceh, anggapan mereka ini Jawa telah menjajah Aceh, perlakuan Jawa tidak ada bedanya ketika Belanda dan Jepang menjajah Aceh.

Puncak kekecewaan ini, pada tanggal 4 Desember 1976, Hasan Tiro kembali memproklamirkan berdirinya “ Aceh Meurdeka ”, sejak itu terulang kisah sebelumnya, Aceh kembali menjadi sasaran militer, Aceh menjadi Daerah operasi Jaring Merah (1980 – 1990), Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (1990-1998), kendatipun telah memiliki Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2001 konflik Aceh masih berlanjut. Kepada Aceh pernah di tetapkan status Darurat Militer, Daerah status Darurat Sipil. Kejadian musibah Tsunami mungkin suatu solusi yang merupakan kehendak Allah yang dapat merubah Aceh menjadi lain, status darurat berakhir, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan pendekatan dengan petinggi GAM di luar negeri, puncaknya tanggal 15 Agustus 2005 di tandatangani kesepakatan damai. Muara akhir lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

C. Kondisi Penduduk dan Adat Istiadat Masyarakat Aceh

Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dulu dan sekarang sedikitnya ada sembilan (9) bahasa yang menjadi pertalian dan alat komunikasi dalam masyarakat, seperti yang ditulis oleh Muliadi Kurdi dalam bukunya *Menelusuri*

*Karakteristik Masyarakat Desa : Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh*²⁰, yaitu :

1. Bahasa Aceh yang hampir dipergunakan sekitar 60% sampai 70 % penduduk Aceh yang wilayahnya antara lain seluruh pesisir utara, barat dan selatan termasuk Sabang atau yang mendiami Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Kota Lhok Seumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, sebahagian Aceh Tamiang, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, bahkan hampir merata di seluruh NAD, kecuali di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Singkil tergolong sedikit.
2. Bahasa Gayo yang dipergunakan sekitar 20 % dari masyarakat yang mendiami wilayah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bahasa ibu dari masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues. sebagian kecil wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan wilayah Lokop Serbejadi dan Pulo Tiga Kabupaten Aceh Tamiang
3. Bahasa Alas, bahasa ini sejak lama telah dipergunakan oleh masyarakat yang mendiami Aceh Tenggara , bahasa ini lebih mirip dengan bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat etnis Karo di Kabupaten Karo Sumatra Utara
4. Bahasa Tamiang, bahasa ini dipergunakan oleh masyarakat yang mendiami Kabupaten Tamiang yang apabila diperhatikan dari dialek bahasa yang dipergunakan adalah maka bahasa ini dapat kita pastikan sebagai bahasa melayu yang ada di Aceh, Bahasa Tamiang ini dominan bahasa sehari-hari di hulu Kabupaten Tamiang, kecuali di Kecamatan Minyak Payed sudah bahasa Aceh, sedangkan di kota Kuala Simpang bercampur termasuk Bahasa Jawa, Batak dan lain-lain karenanya bahasa sehari-hari di kota tersebut dipakai Bahasa Indonesia

²⁰Muliadi Kurdi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa : Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005) h. 115 - 123

*Karakteristik Masyarakat Desa : Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh*²⁰, yaitu :

1. Bahasa Aceh yang hampir dipergunakan sekitar 60% sampai 70 % penduduk Aceh yang wilayahnya antara lain seluruh pesisir utara, barat dan selatan termasuk Sabang atau yang mendiami Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Kota Lhok Seumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, sebahagian Aceh Tamiang, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, bahkan hampir merata di seluruh NAD, kecuali di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Singkil tergolong sedikit.
2. Bahasa Gayo yang dipergunakan sekitar 20 % dari masyarakat yang mendiami wilayah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bahasa ibu dari masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, sebagian kecil wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan wilayah Lokop Serbejadi dan Pulo Tiga Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bahasa Alas, bahasa ini sejak lama telah dipergunakan oleh masyarakat yang mendiami Aceh Tenggara, bahasa ini lebih mirip dengan bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat etnis Karo di Kabupaten Karo Sumatra Utara.
4. Bahasa Tamiang, bahasa ini dipergunakan oleh masyarakat yang mendiami Kabupaten Tamiang yang apabila diperhatikan dari dialek bahasa yang dipergunakan adalah maka bahasa ini dapat kita pastikan sebagai bahasa melayu yang ada di Aceh, Bahasa Tamiang ini dominan bahasa sehari-hari di hulu Kabupaten Tamiang, kecuali di Kecamatan Minyak Payed sudah bahasa Aceh, sedangkan di kota Kuala Simpang bercampur termasuk Bahasa Jawa, Batak dan lain-lain karenanya bahasa sehari-hari di kota tersebut dipakai Bahasa Indonesia.

²⁰Muliadi Kurdi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa : Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005) h. 115 - 123

5. Bahasa Aneuk Jamee, bahasa ini merupakan bahasa ibu yang dipergunakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebahagian Aceh Selatan dan sebahagian Singkil, yang apabila diperhatikan dari dialek bahasanya maka bahasa ini merupakan campuran antara bahasa Aceh dengan bahasa minang yang ada di Sumatera Barat, dimana Aneuk Jamee berarti “anak tamu” karena perpaduan bahasa Aceh dengan bahasa para pendatang dari Minangkabau Sumatera Barat
6. Bahasa Kluet, bahasa ini merupakan bahasa ibu dari masyarakat yang mendiami Kecamatan Kluet Utara dan Kluet Selatan di Kabupaten Aceh Selatan
7. Bahasa Singkil, agak sulit memahami Bahasa Singkil yang sebenarnya karena informasi tentang bahasa ini masih sangat terbatas. serta kenyataan yang ada di Singkil sendiri saat ini dalam komunikasi sehari-hari, sedikitnya ada enam (6) bahasa yang dipergunakan yaitu Aneuk Jamee, Minang, Aceh, Haloban, Pakpak Dairi dan bahasa Singkil sendiri.
8. Bahasa Haloban, pengguna bahasa Haloban dewasa ini kita dapati di Pulau Banyak khususnya di Pulau Tuanku, maka ada kekhawatiran kita bahasa ini tidak dikembangkan suatu saat akan tinggal catatan para peneliti bahasa saja.
9. Bahasa Simeulue, bagi masyarakat Pulau Simeulue Kabupaten Simeulue menganggap hanya ada bahasa Simeulue, kenyataannya disana juga terdapat dialek yang berbeda yaitu Bahasa Simeulue, Bahasa Lamamek atau Sigulai serta Bahasa Devayan yang berbeda dan terpisah.

Bahasa di atas adalah alat komunikasi rakyat atau bahasa sehari-hari, bahasa ini pula merupakan gambaran corak suku asli yang mendiami Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di tambah lagi dengan bahasa para suku bangsa pendatang seperti Minang, Banjar, Tionghoa, Batak, Jawa dan sebagainya. Pasca Tsunami Aceh Tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, di Aceh banyak sekali NGO dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik Nasional dan asing bermarkas di

5. Bahasa Aneuk Jamee, bahasa ini merupakan bahasa ibu yang dipergunakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebahagian Aceh Selatan dan sebahagian Singkil, yang apabila diperhatikan dari dialek bahasanya maka bahasa ini merupakan campuran antara bahasa Aceh dengan bahasa minang yang ada di Sumatera Barat, dimana Aneuk Jamee berarti “anak tamu” karena perpaduan bahasa Aceh dengan bahasa para pendatang dari Minangkabau Sumatera Barat
6. Bahasa Kluet, bahasa ini merupakan bahasa ibu dari masyarakat yang mendiami Kecamatan Kluet Utara dan Kluet Selatan di Kabupaten Aceh Selatan
7. Bahasa Singkil, agak sulit memahami Bahasa Singkil yang sebenarnya karena informasi tentang bahasa ini masih sangat terbatas. serta kenyataan yang ada di Singkil sendiri saat ini dalam komunikasi sehari-hari. sedikitnya ada enam (6) bahasa yang dipergunakan yaitu Aneuk Jamee, Minang, Aceh, Haloban, Pakpak Dairi dan bahasa Singkil sendiri.
8. Bahasa Haloban, pengguna bahasa Haloban dewasa ini kita dapati di Pulau Banyak khususnya di Pulau Tuanku, maka ada kekhawatiran kita bahasa ini tidak dikembangkan suatu saat akan tinggal catatan para peneliti bahasa saja.
9. Bahasa Simeulue, bagi masyarakat Pulau Simeulue Kabupaten Simeulue menganggap hanya ada bahasa Simeulue, kenyataannya disana juga terdapat dialek yang berbeda yaitu Bahasa Simeulue, Bahasa Lamamek atau Sigulai serta Bahasa Devayan yang berbeda dan terpisah.

Bahasa di atas adalah alat komunikasi rakyat atau bahasa sehari-hari, bahasa ini pula merupakan gambaran corak suku asli yang mendiami Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di tambah lagi dengan bahasa para suku bangsa pendatang seperti Minang, Banjar, Tionghoa, Batak, Jawa dan sebagainya. Pasca Tsunami Aceh Tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, di Aceh banyak sekali NGO dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik Nasional dan asing bermarkas di

Aceh, untuk LSM/NGO asing baik secara perorangan maupun Lembaga bahkan atas nama Negara, bebas saja keluar masuk Aceh, di perbolehkan menetap serta membuat kantor di Aceh sesuai peraturan yang berlaku. Walaupun kasus orang asing ini ada yang merasa optimis hanyalah membantu orang rakyat Aceh yang tertimpa musibah Tsunami, dan sebahagian lagi merasa khawatir bahwa itu sikap simpati dan pertolongan negara asing tersirat maksud tertentu seperti pemurtadan Anak Aceh yang banyak dimuat Koran Indonesia di tahun 2005.

Adapun jumlah penduduk Nanggroe Aceh Darussalam menurut data semester I tahun 2006 adalah 4.075.599 jiwa²¹, dibandingkan sebelum Tsunami umpamanya akhir tahun 2004 yaitu sebanyak 4.073.006 jiwa penduduk, tidak jauh berbeda, hal ini mungkin disebabkan musibah Tsunami telah menelan korban meninggal sebesar 107.700 jiwa dan dinyatakan hilang sebanyak 132.172 jiwa, sehingga jumlahnya mencapai 239.872 jiwa, ditambah lagi dengan akibat komplik yang berkepanjangan sampai dengan diberlakukannya Darurat Militer di Aceh yang mencapai sekitar 1321 orang terbunuh, 1958 orang hilang²².

Penyebaran penduduk agak lebih padat di jalur-jalur jalan darat dan perkotaan seperti sekitar Jalan Nasional Medan – Banda Aceh yang melewati beberapa Kota Kabupaten seperti Kuala Simpang, Langsa, Idi Rayeuk, Lhok Suekoun, Lhok Seumawe, Bireun, Sigli, kemudian lebih jarang di bagian tengah dan pantai barat selatan

Dalam hal adat istiadat di Aceh memang unik, ada beberapa kata yang hampir memiliki kesamaan arti, kata itu adalah : *Adat – hukom – qanun - reusam*, tetapi pembagian bidangnya jelas ada penanggung-jawab masing-masing, secara umum, kata bijak orang Aceh berikut merupakan gambaran adat istiadat dan sosial budaya orang Aceh, :

²¹ Sumber : BPS Provinsi NAD, September 2006

²² Azyumardi Azra, "Sebuah Pengantar" Implementasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam : Perspektif Sosio-Historis, dalam Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*, (Banda Aceh dan Jakarta: Kerjasama IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Logos Wacana Ilmu, 2003), h. xxiv

Adat bak Potue Meureuhom,
Hukom bak Syiah Kuala,
Qanun bak Putroe Phang,
Reusam bak Laksamana,
Hukom ngon adat,
Lagee zat ngon sifeuet
 Adat berada di tangan Sultan,
 Hukum berada di tangan Ulama,
 Qanun (peraturan) berada di tangan Putri Pahang,
 Resam (kebiasaan) berada di tangan Laksamana,
 Hukum dengan adat,
 Seperti dzat dengan sifat²³.

Dalam sisi bahasa Gayo bagian tengah Aceh juga ada ucapan bijak seperti kalimat : *Edet pegerni Agama* (Adat itu melindungi agama), dengan demikian adat yang berkembang dan berlaku di Aceh, senantiasa bersendikan Agama Islam atau dengan kata lain bahwa kebudayaan diwarnai oleh ajaran Islam²⁴, sebab ungkapan di atas jelas memberi pengertian bahwa, hukum dalam pengertian syari'ah Islam dengan adat di umpamakan seperti Sifat dengan dzat, satu wujud dalam menentukan tanda, kreteria dan ciri-ciri wujud itu muncul nama atau gelar lain, yang memberi pengertian atau lebih di kenal dengan penyebutan sifat, kendatipun masih di dapati warisan kepercayaan Hindu dan animisme lainnya²⁵.

Perbedaan asal usul masyarakat Aceh, merupakan indikasi adanya perbedaan karakter dalam kesehariannya, orang Aceh Pesisir berkemungkinan satu rumpun dengan orang India, Bangladesh dan sebagainya, hal ini terlihat jelas dari postur tubuh, cara berpakaian dan bahasa ada kemiripan. Sedangkan bagian tengah umumnya suku Gayo, Alas satu rumpun dengan Batak termasuk rumpun orang-orang Vietnam, Birma, hal ini juga terlihat dari adat, cara berpakaian dan berbahasa, maka tiadalah keliru kalau suku Gayo mirip dengan Karo termasuk Alas dan Singkil, di bagian selatan merupakan gabungan dengan Minang, Sibolga, mungkin yang menghubungkan mereka adalah pesisir laut di bagian

²³*Ibid*, h. xxv

²⁴*Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, 1990) h.6

²⁵*Ibid*

selatan, hal ini juga terlihat dari bahasa keseharian mereka, kemiripan yang terdapat dalam masyarakat. Maka tidak berlebihan ada teori bahwa masyarakat Aceh berasal dari Arab, Cina, Eropa dan Hindia²⁶

Oleh karena perbedaan ini, walaupun pada umumnya orang Aceh berwatak keras, tidak mau didikte, tidak cepat menyerah dalam setiap semua kesempatan dan teguh menghadapi masalah. Sedikit sekali orang Aceh yang mau bekerja keras sehingga membuat rasa kegotong-royongan sangat tinggi, duduk di *meunasah-meunasah* menunggu waktu shalat tiba, atau duduk berlama-lama di warung kopi membicarakan hal-hal yang tanpa judul atau cerita bohong, juga sebahagian ada yang senang berjudi, mengadu ayam, sapi, kuda dan ayam. Teguh memegang prinsip seperti berbahasa dalam forum resmi masih menggunakan bahasa Daerah sebagai bahasa pengantar, masih banyak di dapati di kampung-kampung yang belum bisa, atau belum lancar menggunakan bahasa Indonesia.

Watak orang Aceh di bagian pesisir tetap menaruh curiga kepada setiap pendatang baru, kecuali seseorang yang dengan sopan dan santun, serta di dukung dengan bahasa agama, akan lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat. Sebaliknya di bagian pedalaman Aceh, mudah sekali menerima pembaharuan serta mudah bergaul dengan siapa saja, penghormatan kepada orang atau pendatang baru sangat tinggi, sehingga lebih mudah di kuasai, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Akibatnya dapat diperkirakan suku pendatang lebih makmur dari segi materi dari pada penduduk asli (pribumi), karena tanpa banyak pertimbangan terus memberikan sesuatu yang dibutuhkan (tanah, rumah, bekal awal) kepada para tamu atau pendatang, seperti suku Jawa, Suku Minang, suku Batak dan WNI keturunan Tionghoa.

Sekali lagi perbedaan ini mungkin karena perbedaan dari rumpun keturunan asli orang Aceh. Sisi lain tidak dapat dikelabui bahwa orang Aceh tidak menolak kehadiran siapa saja ke Aceh sejak masa terdahulu, hal ini di buktikan

²⁶ Kurdi, *Menelusuri*, h.32

dengan adanya nama kampung seperti Kampung Jawa, Kampung Palembani. Termasuk saat ini bahwa hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia hidup damai di Aceh, dalam kategori yang sama kendatipun berlainan agama selain Islam, keberadaan mereka justru dilindungi hidup di Aceh.

D. Formalitas Ke-Islam-an Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam

Seperti telah di uraikan terdahulu, bahwa masyarakat Aceh sangat identik dengan komunitas Islam, penduduk asli Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) secara pasti pemeluk Agama Islam, baik yang berada di Aceh maupun berdomisili di luar Aceh. Maka ciri yang menonjol pada orang Aceh adalah panatik dengan Islam, rasa keberagaman orang Aceh tidak boleh terusik, karena begitulah watak dan tabiat orang Aceh.

Melekatnya Islam bagi komunitas masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam, telah di alami secara turun temurun. Identitas Islam bagi masyarakat merupakan suatu kemutlakan, Islam sebagai budaya, Islam sebagai pedoman hidup, bagi masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, dienuh Islam yang tidak diragukan harus nampak secara formal, maka Islam tumbuh subur dalam masyarakat, bukti konkrit keadaan ini di dukung kenyataan di lapangan, di antaranya adalah :

1. Banyaknya terdapat *meunasah*, Surau dan langgar dan masjid dan ditempat-tempat itu akan di dapati segala bentuk pengajian agama, mulai dari tingkat orang tua, orang dewasa dimana pengajian agama lebih diarahkan kepada bagaimana mengkaji seluk beluk agama, persoalan halal dan haram yang sifatnya pendalaman keagamaan, upaya menambah jumlah ibadah serta kajian kebijakan orang tua mendidik anak dalam rumah tangga. Pengajian remaja dan anak-anak lebih di arahkan kepada pengenalan tulis baca al-Qur'an, pembelajaran hal-hal yang berkaitan dengan fiqh, sehingga doktrin ketauhidan akan terus melekat pada jiwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.

2. Banyaknya *dayah-dayah* atau tempat pengajian kecil sampai kepada pondok pesantren secara tradisional, untuk dayah disamping tempat belajar bagi para penuntut ilmu, yang datang dari luar Daerahnya, dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Sedangkan pesantren sebagai tempat pemondokan para penuntut ilmu agama, yang datang dari berbagai penjuru Daerah. Secara tradisional para santri akan belajar tentang seluk beluk agama Islam, melalui kitab kuning yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Keberadaan Pondok Pesantren secara tradisional saat ini telah mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman, sehingga banyak pesantren sudah dilaksanakan secara terpadu dan modern, yang “cenderung mengalami babak baru dalam politik pendidikan pesantren yang berusaha mendekati sistem pendidikan nasional”²⁷. Sehingga tidak ada alasan lagi memasukkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pokok di Pesantren, sebelumnya memang dianggap bahasa kafir, hal yang sama tidak tabu lagi melihat televise, karena layar komputer sama dengan televisi, sesuai dengan perkembangan masa, maka pengetahuan bahasa asing, penggunaan tehnologi mutakhir sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pesantren dewasa ini.
3. Pendidikan formal dalam bidang agama, hampir merata di seluruh Aceh, bahkan tergolong banyak di Indonesia, jika dibandingkan dengan Daerah-Daerah atau provinsi lain, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang berstatus negeri dibawah tanggung jawab pemerintah, maupun yang di kelola oleh swadaya masyarakat atau swasta. Banyaknya bermunculan, pendirian Sekolah Dasar di Aceh, karena program Pemerintahan Orde Baru melalui Instruksi Presiden, untuk membangun Sekolah Dasar yang negeri dan lebih dikenal dengan Sekolah Dasar (SD) Inpres. Sehingga penyebaran Madrasah Ibtidaiyah yang di bawah binaan dan tanggung jawab Departemen Agama, menyamai penyebaran Sekolah Dasar di bawah nanungan

²⁷ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, tth) h.56

Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan jumlah Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, untuk saat sekarang ini, telah lebih banyak Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Atas yang berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional bersifat otonomi.

Menyangkut masalah pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, bukan hanya yang nampak kepermukaan melalui hukum/ekskusi cambuk yang di publikasikan secara luas pada waktu yang lalu, tanggal 1 Muharram 225 H telah berdiri Kerajaan Islam di Bandar Khalifah Peurlak Aceh Timur yang beraliran Syi'ah, ketika Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Kadir Syah Jihan berdaulat (306-310 H) aliran Syi'ah diganti dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah serta dalam pengamalan syari'ah ditetapkan Mazhab Imam Syafi'i, demikian juga ketika Ali Mughayatsyah berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil menjadi Kerajaan Islam Aceh dengan ibukotanya Bandar Aceh Darussalam masih tetap melaksanakan Syari'at Islam, saat Sultan Iskandar Muda (1607-1636) pelaksanaan Syari'at Islam lebih disempurnakan, mazhab Imam Syafi'i diterapkan secara kaffah berdasarkan Qanun Al-Asyi (Adat Maekuta Alam) sebagai Undang-Undang dasar kerajaan, sehingga Sultan sendiri menjadi contoh masyarakat melakukan ekskusi rajam pada anaknya sendiri yang terbukti selingkuh, hukum qishash yang terjadi di Kerajaan Linge dengan cara mengusir seumur hidup dari tanah kelahirannya, membayar denda karena terbukti mencuri yang ditetapkan oleh raja, hal ini membuktikan bahwa penerapan Islam secara kaffah dalam arti luas menandakan keterlibatan penguasa, pelaksanaan bukan hanya substansi tanggung jawab perorangan, akan tetapi secara formal baik dari segi perangkat aturan maupun pelaksana²⁸.

Masih dalam lingkup Syari'at Islam di Aceh usaha penerapan melalui lembaga peradilan, sehingga 13 Januari 1947 Residen Aceh dapat membentuk

²⁸Muslim Ibrahim, *et.al*, *Kontekstualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2003) h. 25-28

Pengadilan Agama sampai dengan tahun 1950, dibentuk kembali tahun 1957 untuk seluruh Aceh. Berdirinya Negara Islam Indonesia tahun 1953, adalah bentuk kekecewaan rakyat Aceh, karena belum merealisasikan janji Soekarno untuk pembentukan provinsi sendiri, dengan kewenangan menjalankan Syari'at Islam di Aceh. Perjuangan penerapan syari'at Islam masih terus berlanjut, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh telah melahirkan beberapa Peraturan Daerah antara lain Perda no. 30 tahun 1961 tentang pembatasan Penjualan makanan dan Minuman pada bulan Ramadhan, Perda no. 1 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Agama Islam, Perda no.1 tahun 1966 tentang Pedoman majlis Permusyawaratan Ulama.

Melemahnya semangat perjuangan penerapan Syari'at Islam di Aceh ketika Amir Mahmud pengganti Basuki Rahmat menjabat Menteri Dalam Negeri RI menolak mengesahkan Rancangan Pelaksanaan Syari'at Islam yang dibuat tahun 1967 yang mengisyaratkan pemerintah pusat tidak memberi izin penerapan Syari'at Islam dimaksud, keyakinan ini bertambah kuat dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, status Daerah Istimewa Aceh sama dengan Daerah lainnya di seluruh Indonesia. Kekecewaan demi kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh, terakumulasi dalam bentuk penyimpangan dan dendam terhadap pemerintah pusat, sejalan dengan kenyataan itu, ada pula pihak yang mencari muka dan mencari keuntungan dimata pemerintah, secara tidak langsung Aceh tercabik-cabik oleh kepentingan politik praktis, sebahagian rakyat Aceh di anggap pemberontak yang harus ditumpas, terjadilah konplik yang berkepanjangan. Menurut penelitian Prof.DR. M.Hasbi Amiruddin, bahwa awal mula konplik itu *pertama*, menentang upaya Kristenisasi yang marak di Aceh sejak tahun 1966, *kedua*, Jakarta tidak berminat mengembangkan Aceh untuk lebih maju, *ketiga*, keputusan Jakarta membangun jalan kelas satu Lhok Seumawe – Medan dengan mengabaikan Banda Aceh sebagai ibukota provinsi, *keempat*, rencana membangun LNG Lhok Seumawe

yang dipusatkan di Sumatera Utara, *kelima*, pemerintah pusat khususnya, mengabaikan pemberian keistimewaan kepada Aceh²⁹

Di Aceh terjadi kemunafikan, fitnah meraja lela, pembunuhan terjadi dimana-mana dan antar sesama, segala kemaksiatan menjadi rahasia umum, Aceh merupakan lahan ganja, dan sebagainya. Mungkinkah dengan Maha kasihnya Allah memberikan cobaan kepada Aceh dan Nias dengan bencana Tsunami, sehingga dapat menggugah hati manusia Indonesia. Hasut, dengki, dendam, fitnah selama ini menjadi reda, apakah Tsunami itu bayaran mahal untuk kedamaian Aceh, terakhir lahirnya Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, apakah menjadi solusi bagi perdamaian abadi di bumi Serambi Mekkah, sebagai Daerah modal perjuangan serta kelangsungan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang terakhir ini, tepatnya Bab XVII pasal 125 sampai dengan Bab XIX pasal 140 mengenai Syari'at Islam dan Pelaksanaannya, Mahkamah Syar'iyah serta Majelis Permusyawatan Ulama. Dengan demikian pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, lebih dipertegas kembali, bersifat tetap dan berlanjut, hal ini merupakan peluang yang telah diberikan sepenuhnya kepada rakyat Aceh sendiri, maka mampukah rakyat Aceh dengan konsisten menerapkannya, tentu tergantung kepada orang Aceh sendiri untuk membuktikannya.

²⁹ Lihat: Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh*, h.65-68